

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR

A. Dianindarwati^{1*}, Budi Setiawati², Jaelan Usman³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of the study was to find out the implementation of the policy for developing coastal tourism objects at the cultural and tourism service in Makassar City. This study used qualitative research. The results showed that the implementation of the policy for the development of coastal tourism objects at the Department of Culture and Tourism in Makassar City, viewed from the aspects: 1. Communication, the Makassar City Culture and Tourism Office was very good because the service office always prioritized communication in every divisions. in each office to run according to the SOP in each office in realizing good service. 2. Resources, the Culture and Tourism Office were good at providing natural resources in each tourist attraction so that each tourist attraction had good natural resources in attracting people who came to take a vacation, 3. Disposition of the Office of Culture and the Makassar City Tourism Office had been said to be good because each employee's office had been given training on tourism development policies in the city of Makassar, 4. The bureaucratic structure of the official was good because the bureaucratic structure in each office had implemented a bureaucratic structure that had been determined directly from the head office.

Keywords: policy implementation, tourism object

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penembangan obyek wisata pantai pada dinas kebudayaan dan pariwisata di Kota Makassar. jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kota Makassar, di lihat dari aspek: 1. Komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor dinas selalu mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan dengan sesuai SOP disetiap masing kantor dalam mewujudkan pelayanan yang bagus. 2. Sumber Daya, pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan bagus dalam menyediakan sumber daya alam disetiap objek wisata supaya masing objek wisata memiliki sumber daya alam yang bagus dalam menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan, 3. Disposisi pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena setiap kantor masing pegawai sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang ada di kota makassar, 4. Struktur Birokrasi pihak kantor dinas sudah dikatakan bagus karena struktur birokrasi yang ada di masing kantor dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan langsung dari kantor pusat.

Kata kunci: implementasi kebijakan, obyek wisata

* adianidarwati@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintah di daerahnya. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat Kebijakan dan Peraturan daerah yang melibatkan pihak - pihak terkait sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing - masing daerah tersebut tidak terkecuali dengan pembangunan sektor Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penataan Kawasan Pulau, Pantai, Pesisir, dan Pelabuhan. Dan Peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030. Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekoomi

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata, digariskan dalam pembangunan.

Pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa indonesia. Menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menetapkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama daalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi

sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencukupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi ketertarikan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Kebudayaan sektor pariwisata Indonesia memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada wisata asing. Jadi faktor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasional, untuk itu segala potensi yang ada di tanah air perlu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu konsep atau rumusan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara nasional (RIPPDA) Rencana Industri

Pengembangan Pariwisata Daerah, regional/ propinsi, dan lokal, kota, serta kabupaten.

Pemerintah kota Makassar untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan wilayah regional dan nasional, karena pariwisata mencakup dan terkait dengan sektor lain seperti: kondisi politik, kamtibmas, telekomunikasi, perdagangan, dan industri serta sektor lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, RIPPDA Kota Makassar diharapkan dapat memiliki kekuatan hukum (perda) yang memiliki dasar tindakan pemerintah kota Makassar dalam mengatur, mengembangkan, dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam wilayahnya. Agar dapat diciptakan pembangunan yang Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, sehingga kedudukan RIPP Kota Makassar menjadi acuan dalam perencanaan pariwisata yang lebih detail/teknis.

Potensi pengembangan sektor pariwisata di kota Makassar mempunyai prospek yang cukup potensial karena mempunyai berbagai jenis obyek wisata meliputi: wisata alam, wisata tirta, kekayaan khasanah sejarah keunikan seni budaya dan kekhasan cendera mata.

Agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan maka, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar perlu melakukan promosi wisata yang terdiri atas promosi dalam dan luar negeri, seperti menerbitkan *leaf leat*, *booklet*, *guide book*, dan rekaman audio visual lainnya yang bermutu standar, pemasangan berbagai iklan dan artikel majalah internasional, berpartisipasi di dalam event-event internasional, nasional, dan regional yang berkaitan dengan promosi wisata dengan maksud dan tujuan mampu memperkenalkan destinasi wilayah kota Makassar.

Pertimbangan peneliti setelah melakukan pengamatan dilapangan di Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan kota makassar memberikan potensi pengembangan sektor pariwisata yang ada di kota makassar karena memberikan proseppek yang cukup potensial yang sangat besar untuk mempunyai berbagai jenis objek wisata meliputi: wisata alam, wisata tirta, kekayaan khasanah sejarah keunikan seni budaya dan cirikhas cendera mata. Oleh karena itu dinas pariwisata bisa berkembang lagi dalam menata objek wisata yang ada di kota makassar supaya lebih dikenal oleh masyarakat atau wisatawan dari luar daerah.

Oleh karena itu, untuk keberhasilan kepariwisataan di kota makassar, Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melaksanakan fungsi sebagai produsen sekaligus sebagai koordinator dari beberapa kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Makassar yaitu dengan cara mempertahankan penataan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Makassar yang tersedia di kawasan Pantai Akkarena yang di mana sebelumnya para pelaku usaha berjualan di badan jalan sekitar anjungan pantai losari Kota Makassar. Tetapi untuk menarik calon pembeli pada sebuah produk baru maka pelaku usaha harus dapat menyakinkan dan menumbuhkan daya tarik terhadap produknya dengan cara pemerintah Kota Makassar tetap memantau serta memberikan perberdayaan para pelaku usaha agar selalu menjaga kebersihan lingkungan setiap area wisata kuliner. Karena kegiatan penjualan hanya mungkin terjadi bila orang sudah mempunyai perhatian, sehingga pada akhirnya konsumen tertarik membeli produk yang ditawarkan. Dengan adanya pemberdayaan yang efektif dapat menumbuhkan serta membangkitkan niat pembeli.

Wisata kuliner merupakan salah satu jenis wisata yang memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan suatu daerah. Nilai positif yang dapat diperoleh dari wisata yang satu ini adalah menumbuhkembangkan potensi makanan asli daerah yang sudah mulai tergeser oleh produk-produk asing, seperti pizza dari Itali, masakan Jepang dan masakan luar negeri lainnya.

Di setiap daerah di pelosok nusantara masing – masing memiliki keragaman kuliner yang khas, mulai dari rasa sampai cara penyajiannya yang sangat cepat menimbulkan selera makan masyarakat. Tidak berbeda dengan daerah lainnya, Kota Gorontalo juga memiliki keragaman kuliner yang dapat menarik wisatawan lokal maupun asing yang asing untuk berkunjung dan mencicipi aneka kuliner yang tersedia adapun data kunjungan wisatawan yang datang berkunjung ke Makassar dalam periode 3 tahun terakhir, dimana tahun 2008 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Makassar mencapai 1.511.680 wisatawan, dan dari wisatawan mancanegara mencapai 24.591 wisatawan, dan pada tahun 2009 jumlah wisatawan nusantara mencapai 2.010.121 dan wisatawan mancanegara 28.223 wisatawan, pada tahun 2010 dimana jumlah wisatawan nusantara

mencapai 2.072.538, dan wisatawan mancanegara mencapai 28.699.

Kebutuhan masyarakat Kota Makassar terhadap kawasan ruang publik sebagai obyek wisata dan kawasan Pantai Akkarena merupakan salah satu ikon pariwisata yang terjangkau menjadikan dibutuhkannya pemberdayaan pelaku usaha wisata kuliner Losari dapat menjadi solusi perekonomian usaha kecil, dan menengah yaitu pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna untuk mewujudkan efektivitas kawasan pariwisata pantai Losari yang tertib dan nyaman bagi pengunjungnya.

Menurut Djabbari, (2021), Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, secara umum inti dari Public Private Partnership (PPP) yaitu keterkaitan dan sinergi yang berkelanjutan (dalam kontrak kerjasama yang panjang) untuk membangun suatu proyek atau fasilitas publik dalam meningkatkan pelayanan publik antara pemerintah selaku regulator, perbankan/konsorsium selaku penyandang dana dan pihak swasta/BUMN/BUMD yang berperan sebagai Special Purpose Company (SPC) yang bertanggungjawab dalam melaksanakan suatu proyek mulai dari proses desain, konstruksi, pemeliharaan

dan operasional. Osborne menjelaskan pendekatan dalam kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) dipandang menjadi hal penting dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar pada masyarakat. Selain itu, dengan adanya keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya seperti anggaran atau keuangan maka keterlibatan sektor swasta (private) menjadi penting didalam urusan publik untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Revalda A.J.B. Salakory, 2017, "Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah" tujuan dari penulisan ini adalah merumuskan konsep pengembangan ekowisata berbasis masyarakat guna sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan pengembangan. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam merancang suatu konsep serta strategi pengembangan ekowisata berbasis

masyarakat, hal mendasar yang harus dilakukan adalah mengenalkan masyarakat tentang konsep ekowisata dikarenakan sebagian besar pengelolaan destinasi di Kepulauan Banda maupun daerah Maluku masih jauh dari konsep ekowisata yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal serta upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, persepsi masyarakat tentang kehadiran destinasi ekowisata agar kegiatan pengembangan sesuai dengan keinginan masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan wisatawan.

Rusyidi & fedryansyah, (2018) "pengembangan pariwisata di Kawasan pantai rambak dan pantai Rebo" pada dasarnya merupakan gambaran dari keseluruhan upaya pengembangan industri pariwisata di kabupaten bangka. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan model alternative yang dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka.

Damara (2014) Wisatawan domestik yang berkunjung ke bandung tentunya memiliki tujuan tertentu untuk datang ke kota wisata ini, seperti liburan, kebutuhan bisnis, tugas kantor, dan mengunjungi kerabat dekat. Motivasi merupakan hal yang sangat

mendasar untuk memahami wisatawan dan perjalanan wisata.

Menurut Mulyono Yalia, (2014), Kebijakan publik salah satu dimensi pokok dalam ilmu administrasi publik. Sebagai salah satu unsur kepentingan dalam administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak dan tubuh manusia, karena melalui instrument ini, segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan serta menjelaskan Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kota Makassar.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan keunikan obyek yang diteliti, memahami proses dan atau interaksi sosial, menggunakan analisis data yan

bersifat deskriptif. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan triangulasi sumber, teknik dan waktu lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar No.23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kebudayaan Kota Makassar, berdasarkan hal tersebut maka dinas kebudayaan kota makassar mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang kebudayaan serta pembinaan dan pengelolaan permuseuman, keprbakalaan, budaya daerah, pengembangan sumber daya da peran serta masyarakat.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat indoneia. Adapun beberapa indikator yang di pakai oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian di lapangan yaitu sebagai berikut:

Komunikasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor dinas selalu mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan dengan sesuai SOP disetiap masing kantor dalam mewujudkan pelayanan yang bagus dikantor. Oleh karena itu masing kantor selalu mengadakan meeting disetiap bidang agar karyawan bisa berkomunikasi langsung ke wisatawan yang datang dari luar Sulawesi supaya bisa menerapkan sistem komunikasi yang baik dan sopan terhadap wisatawan. Adapun jenis komunikasi dalam menunjang pengembangan obyek wisata yakni melalui sosialisasi. Oleh karena itu pihak Kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus dalam mensosialisasikan objek wisata kepada pihak masyarakat. Supaya pihak masyarakat bisa mengetahui objek wisata yang belum didatangi langsung oleh masyarakat. Melalui Promosi dari pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor masing selalu melakukan promosi objek wisata yang baru di buka supaya menarik minat dari masyarakat untuk datang ke

lokasi objek wisata yang baru dibuka oleh kantor Dinas masing supaya objek wisata yang baru banyak didatangi oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar.

Sumber Daya

Dari pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan bagus dalam menyediakan sumber daya alam disetiap objek wisata supaya masing objek wisata memiliki sumber daya alam yang bagus dalam menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan bersama keluarga. Adapun sumber daya yang dimaksud yakni Fasilitas. Oleh karena itu dari pihak Kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena dari pihak kantor masing selalu menyediakan fasilitas bagus di masing objek wisata supaya masyarakat yang datang ke objek wisata tidak merasa bosan dalam menikmati liburan bersama keluarganya. Dari pengelola objek wisata selalu melakukan pengecekan di setiap fasilitas yang perlu di perhatikan kondisi agar fasilitas tersebut bisa di perbaiki langsung dari pusat. Juga Kewenangan, pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus dalam menjaga kewenangan disetiap objek wisata supaya berjalan dengan sesuai

kesepatan bersama dalam merawat dan menjaga objek wisata lebih maju untuk kedepannya. Dari kantor dinas selalu berkomunikasi langsung kepada pemerintah pusat supaya bisa mengembangkan bersama suatu objek wisata yang ada di kota makassar.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Penerapan Staf Dan Sikap oleh pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena setiap kantor masing pegawai sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang ada di kota makassar. Supaya pegawai tersebut bisa menerapkan ilmu yang diberikan langsung dari kantor dan bisa berjalan dengan keinginan dari kantor pusat setiap pegawai diberikan tugas untuk menghendel semua kegiatan yang ada disuatu objek wisata supaya berjalan dengan rapi dan sesuai dengan program yang sudah berlakukan oleh pihak kantor dinas.

Pegangkatan birokrasi dari pihak masing kantor dinas sudah dikatakan bagus karena pengangkatan birokrasi setiap masing kantor menerapkan suatu sistem dala, mengangkat birokrasi terlebih dahulu mengadakan suatu pelatihan dan diklat setiap masing karyawan yang mau naik jabatan

birokrasi yang ada di kantor supaya karyawan bisa diketahui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masing pegawai.

Insentif dari setiap kantor sudah dikatakan bagus karena pihak atasan langsung memberikan insentif kepada bawahannya supaya karyawan merasa terdorong atas pemberian insentif langsung dari atasannya. Pihak kantor dinas itu sendiri memberikan insentif supaya karyawan lebih semangat lagi dalam bekerja dan mengembangkan suatu objek wisata yang ada di Kota Makassar.

Struktur Birokrasi

Oleh karena itu dari pihak kantor dinas sudah dikatakan bagus karena struktur birokrasi yang ada di masing kantor dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan langsung dari kantor pusat. Agar struktur birokrasi di masing kantor bisa berjalan dengan baik sesuai kebijakan untuk mengembangkan suatu objek wisata yang ada di Kota Makassar.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini dilakukan di lapangan tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Di Kota Makassar: 1. Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor dinas selalu mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan dengan sesuai SOP di setiap masing kantor dalam mewujudkan pelayanan yang bagus di kantor. Oleh karena itu masing kantor selalu mengadakan meeting di setiap bidang agar karyawan bisa berkomunikasi langsung ke wisatawan yang datang dari luar Sulawesi supaya bisa menerapkan sistem komunikasi yang baik dan sopan terhadap wisatawan. Adapun jenis komunikasi dalam menunjang pengembangan obyek wisata yakni melalui: sosialisasi, promosi, 2) Sumber Daya dari pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan bagus dalam menyediakan sumber daya alam di setiap objek wisata supaya masing objek wisata memiliki sumber daya alam yang bagus dalam menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan bersama keluarga, 2) Disposisi (Sikap Pelaksana) pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena setiap kantor masing pegawai sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang ada di kota

Makassar. Supaya pegawai tersebut bisa menerapkan ilmu yang diberikan langsung dari kantor dan bisa berjalan dengan keinginan dari kantor pusat setiap pegawai diberikan tugas untuk menghandle semua kegiatan yang ada di suatu objek wisata supaya berjalan dengan rapi dan sesuai dengan program yang sudah berlakunya oleh pihak kantor dinas, 3) Struktur Birokrasi oleh karena itu dari pihak kantor dinas sudah dikatakan bagus karena struktur birokrasi yang ada di masing kantor dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan langsung dari kantor pusat. Agar struktur birokrasi di masing-masing kantor bisa berjalan dengan baik sesuai kebijakan untuk mengembangkan suatu objek wisata yang ada di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Muzakkar, A. K. (2019). *Studi Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Akkarena Sebagai Sarana Rekreasi Bagi Masyarakat Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Negeri Makassar).
- Damara, G. H., M. Yusup, P., & A, R. K. (2014). Perilaku Pencarian Informasi Pariwisata Para Wisatawan Domestik di Rumah Mode. *Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, 2(1), p. 27. <https://doi.org/10.24198/jkip.v2i1.11621>

- G.A. Kristha A. Indraningsih. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu Implementation of Tourism Development Policy Palu City. *Pariwisata Parama*, 1(1), pp. 31–41.
- Gokovali, U., & Bahar, O. (2006). Contribution of Tourism to Economic Growth: A Panel Data Approach. *Anatolia*, 17(2), pp. 155-162.
- Irawan E, (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ejaring Administrasi Publik*,7(2), pp. 757-770.
- Narendra, A. N., Habsari, S. K., & Ardianto, D. T. (2019). Kepemilikan Serta Pembentukan Modal Sosial Oleh Wisatawan Dalam Memilih House Of Sampoerna Sebagai Daya Tarik Wisata. *Pariwisata Pesona*, 04(1), pp. 1–10.
- Nurhayati. (2014). *Analisis Investasi Sektor Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nurhayati Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Kepulauan Riau (UNRIKA)*.
- Nasution, R. H, Avenzora, R, & Sunarminto, T. (2018). Analisis Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata Di Indonesia *The Analylsis Ecotourism Laws And Policies In Indonesia*. 23(1), pp. 9-17.
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(1), p. 144. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p26>
- Silitonga, S. S. M., & Anom, I. P. (2016). Kota Tua Baru Sebagai Daerah Tujuan Wisata Sejarah Di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), pp. 7–13.
- Stih, L. A. S. (2018). Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat Role. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7(1), Januari–Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Sutanto, S. A., & Lubis, A. (2019). Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web Pada Awan Tour Travel. *Jurnal Teknik Informatika*, 14(1),15–20. <https://doi.org/10.35793/jti.14.1.2019.23780>
- Soebagyo. (2012). Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia, *Jurnal Liquidity 11(2)*. Diakses Pada hari Selasa, 22 April 2019. <https://scholar.google.co.id/scholar?q=soebagyo+2012+pengaruh+strategi&hl=id&as=1&oi=scholar#d=gsqabs&u=%23p%3D3yPTFA ANgj>
- Umar, Z. (2017). Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(1), pp. 1–13.
- Puspawati D. P. H., & Ristanto. (2018). Strategi Promosi Digital Untuk Pengembangan Pariwisata Kota Magelang. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*. 1(2), pp.1-20.
- Yoeti, A, O. (2001). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Perundang-Undangan: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Sulawesi Selatan.
- Djabbari, M. H., Alwi, & Tamrin, S. H. (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal*

Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 7(1), pp. 1–13.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/13203>

Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat (The Implementations Of Development And Empowerment Of Traditional Social Media In West Java). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 149.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191>